BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku penyebar berita bohong (*hoax*) di Kepolisian Daerah Sumatera Barat melakukan upaya penanggulangan dengan pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Penanganan kasus penyebaran berita bohong (*hoax*), Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki satuan yang menangani pelaku penyebaran berita bohong, yaitu Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Sumatera Barat. Prosedur penanganan tindak pidana penyebaran berita bohong (*hoax*) dengan cara, yaitu, menerima laporan aduan dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, SPDP, gelar perkara, pengiriman berkas perkara ke kejaksaan dan pelimpahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan.
2. Kendala-kendala yang ditemukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah dari faktor internal, *fake account* dan akun anonim yang menjadi tantangan kepolisian dalam menangani kasus *hoax*, terhapusnya bukti postingan yang memuat konten *hoax* yang membuat lambat dan menyulitkan kepolisian dalam memperoleh keterangan yang lengkap dari saksi, kendala lainnya di fasilitas seperti laboratorium forensik digital dan keterbatasan personel yang memiliki keahlian dalam bidang forensik digital dan penanganan *cybercrime* juga menjadi faktor penghambat. Faktor eksternal (dari masyarakat) masyarakat masih banyak yang kurang dalam pemahaman tentang bentuk berita bohong, kurangnya literasi digital

yang juga membuat masyarakat mudah percaya suatu berita yang faktanya belum diketahui pasti atau belum terverifikasi bukan berita bohong serta berasal dari sumber yang jelas.

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin diajukan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu:

1. Agar pemerintah terutama Kementerian komunikasi dan digital (Komdigi) harus meningkatkan sosialisasi terkait literasi digital dan bahaya berita bohong kepada masyarakat melalui program edukasi di berbagai *platform* sosial media, termasuk lembaga pendidikan. Mengembangkan regulasi yang lebih spesifik terhadap perkembangan teknologi digital guna memperjelas sanksi bagi pelaku penyebaran *hoax*.
2. Agar kepolisian juga harus lebih giat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan literasi digital bagi masyarakat, baik melalui program pendidikan formal maupun kampanye edukasi tentang bahaya dan dampak negatif dari *hoax* yang melibatkan pemerintah dan lembaga masyarakat. Meningkatkan pemahaman aparat Kepolisian Sumatera Barat dengan melakukan sebuah pelatihan khusus di bidang teknologi informasi dan penanganan kasus *hoax*. Fasilitas perangkat lunak yang lebih canggih sangat dibutuhkan untuk kepolisian dan perlu ditingkatkan agar lebih memudahkan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam kasus *cybercrime*.
3. Agar *provider platform* media sosial juga harus memperkuat mekanisme deteksi dan penghapusan konten yang mengandung berita bohong melalui

sistem kecerdasan buatan (AI), serta memperketat aturan moderasi konten dan mendorong pengguna media sosial untuk lebih aktif dalam melaporkan konten yang mencurigakan dengan menyediakan fitur pelaporan yang lebih mudah diakses dan digunakan oleh masyarakat.

4. Agar masyarakat, terutama konsumen terhindar dari berita bohong (*hoax*) haru selalu berhati-hati dan teliti seperti harus melihat terlebih dahulu rating atau ulasan marketplace atau penjual, gunakan metode pembayaran yang aman, cek reputasi penjual melalui media sosial atau forum konsumen, waspadai penawaran yang terlalu murah atau tidak masuk akal, jangan sembarangan memberikan data pribadi. jika menemukan sebuah berita bohong segera harus laporkan ke pihak yang berwenang atau adukan ke *website* Klinik Hoaks Sumatera Barat atau langsung ke *website* Kementerian Komunikasi dan digital.